

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Empat, tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah berusaha untuk mencapai tujuan tersebut melalui pelaksanaan program pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkesinambungan, salah satunya adalah program subsidi dan bantuan sosial. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan komunitas yang kurang mampu atau miskin.

Kemiskinan menjadi permasalahan umum yang hampir terdapat di seluruh negara di dunia. Kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah sosial yang perlu diteliti secara terus – menerus karena kemiskinan adalah masalah yang telah ada sejak lama dan masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Pada saat ini gejalanya semakin meningkat karena krisis multidimensi yang masih dihadapi Indonesia. Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25,90 Juta orang. Berdasarkan penelitian Manurung dkk (dalam Lisnawati Sopiha dan Ria Haryatiningsih, 2023) Kemiskinan bukan hanya diartikan pada tidak mampu dalam hal

perekonomian saja, namun tentang gagal terpenuhinya berbagai hak dasarnya seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan perbedaan perlakuan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat. Berbagai program seperti program bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Gejala kemiskinan masih belum diatasi sepenuhnya. Salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan secara khusus bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi maka pemerintah meluncurkan suatu program khusus yaitu Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan menjadi salah satu program perlindungan sosial yang ada di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Berdasarkan Misnawati (dalam La Ode Amijaya Kamalussin, 2021) Program Keluarga Harapan merupakan program yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada Tahun 2007 untuk memutus rantai kemiskinan keluarga.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Permensos No 1 Tahun 2018) mendefinisikan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) dan/atau rentan miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Data terpadu program penanganan fakir miskin kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan yang secara khusus bertujuan untuk menghentikan rantai kemiskinan antar generasi. Di seluruh dunia, program ini disebut dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sejak diluncurkan pada Tahun 2007, Program Keluarga Harapan telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong penerima bantuan sosial, yang selanjutnya dikenal sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi lebih mandiri.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk membuka akses Keluarga Penerima Manfaat bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan (faskes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan (fasdik). Manfaat Program Keluarga Harapan pada saat ini juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia.

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kemiskinan, dan mengenalkan manfaat dari produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan (Firda Wiku, 2021) kemiskinan yang mengsinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial Program Keluarga Harapan diarahkan sebagai *center of excellence* pada upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sejak adanya program Program

Keluarga Harapan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terus meningkat secara bertahap. Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan berkelanjutan sejak Tahun 2007 di 7 (tujuh) provinsi termasuk juga Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020 Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. Perkembangan jumlah penerima serta alokasi anggaran dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. 1 Perkembangan Program Keluarga Harapan di Indonesia

Berdasarkan Buku Pedoman Program Keluarga Harapan, Pada Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2010-2014 terjadi peningkatan target penerima manfaat dan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan, melampaui *baseline* target perencanaan. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan Tahun 2016 adalah sebanyak 6 Juta Keluarga Penerima Manfaat dengan anggaran sebesar Rp.10 Triliun. Kemudian pada Tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan meningkat menjadi 6.228.810 keluarga dengan

anggaran bantuan sosial sebesar Rp.11,5 Triliun. Pada Tahun 2018, terjadi peningkatan target jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang cukup signifikan menjadi 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat dengan realisasi 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19,4 Triliun. Pada akhir Tahun 2019, terjadi penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat menjadi 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34,2 Triliun. Pada Tahun 2020 capaian sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36,9 Triliun.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika pengeluarannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, selama satu bulan. Batas pengeluaran ini disebut Garis Kemiskinan (GK). Pada bulan Maret 2023, Garis Kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar Rp550.458,- per kapita per bulan. Komposisi dari Garis Kemiskinan ini adalah sebagai berikut: Garis Kemiskinan Makanan: Rp408.522,- (74,21%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan: Rp141.936,- (25,79%).

Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia pada bulan Maret 2023 memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sekitar Rp2.592.657,- per bulan. Tidak memenuhi kriteria partisipasi dan/atau peningkatan kondisi sosial ekonomi yang dibuktikan melalui pemutakhiran data dianggap sebagai graduasi (Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, 2020). Dua jenis graduasi, atau berakhirnya kepesertaan Keluarga

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, adalah sebagai berikut Graduasi Alamiah berakhir karena kondisi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan, seperti tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan seperti kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial, Selanjutnya adalah Graduasi Sejahtera Mandiri berakhir karena kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Keluarga Penerima Manfaat mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera karena mendapat penghasilan yang lebih baik, memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan sukses.

Kementerian Sosial (2020) mencatat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah melampaui target yang ditentukan. Sebanyak 1.179.304 Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menyatakan keluar dari kepesertaan Program Keluarga Harapan pada tahun tersebut.

Dari total Keluarga Penerima Manfaat yang mengalami graduasi, ada dua jenis graduasi yang terjadi di Program Keluarga Harapan pada tahun tersebut yaitu Graduasi Mandiri: Sebanyak 341.773 Keluarga Penerima Manfaat secara sukarela mengundurkan diri dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Hal ini biasanya didorong oleh faktor perekonomian Keluarga Penerima Manfaat yang mulai membaik dan juga Graduasi Alamiah: Sebanyak 837.531 KPM sudah tidak mempunyai lagi unsur penerima, misalnya karena anak-anak sudah selesai sekolah semua.

Beberapa provinsi di Indonesia yang paling banyak menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan antara lain: di Provinsi Jawa

Tengah sebanyak 258.989 KPM, Jawa Timur: sebanyak 225.183 KPM dan Jawa Barat sebanyak 217.184 KPM, Di wilayah luar Jawa, Provinsi Lampung menduduki peringkat pertama dengan 48.558 KPM, diikuti oleh Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Tahun 2024 penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Sebanyak 1.243 Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang telah graduasi berjumlah 41 Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 3,29% Keluarga Penerima Manfaat yang telah graduasi di tahun 2023-2024.

Untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat, Kementerian Sosial mengatur kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dengan batas maksimal 5 tahun. Setelah lima tahun, peserta Program Keluarga Harapan harus segera diganti atau digraduasi untuk memberikan kesempatan kepada keluarga miskin lainnya yang layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif dan negatif bagi peserta Program Keluarga Harapan. Misalnya dari segi kesehatan dampak yang muncul adalah mampu menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan harapan hidup masyarakat, sedangkan dari segi pendidikan Program Keluarga Harapan mempunyai dampak yaitu peningkatan jumlah partisipasi sekolah untuk anak-anak, menawarkan kesempatan kerja yang lebih baik karena anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Dari segi ekonomi, Program Keluarga Harapan memiliki dampak yaitu perilaku menabung

bagi masyarakat sehingga peserta Program Keluarga Harapan dapat mendirikan usaha untuk menambah pendapatan, sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan yaitu membantu meringankan beban pengeluaran. Sedangkan berdasarkan Nurma Mustika Hasna dkk (2019) Dampak negatif adanya pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah Kecemburuan sosial meliputi salah satu dampak negatifnya masyarakat yang tidak mendapat merasa cemburu dan ingin mendapatkan bantuan juga, karena kemudahan yang didapat dari peserta Program Keluarga Harapan. Ketergantungan dari keluarga PKH beberapa keluarga menggantungkan atau menunggu bantuan Program Keluarga Harapan yang keluar setiap tiga bulan sekali tersebut. Masih kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan penggunaan dana yang terkadang kurang tepat sasaran.

Fakta dilapangan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung dari Bulan Januari sampai Bulan April 2024 total Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang telah graduasi berjumlah 41 terbagi menjadi graduasi mandiri dan graduasi alamiah. PKH di Kecamatan Besuki terdapat fenomena dengan adanya bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Masyarakat mengalami ketergantungan dari program tersebut dan juga terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan bantuan. Sehingga disaat graduasi maka masyarakat belum tentu dapat mandiri dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Berdasarkan koordinator Pendamping PKH Kabupaten Tulungagung.

Pada program keluarga harapan terdapat kegiatan P2K2, P2K2 adalah kegiatan wajib untuk diikuti seluruh penerima bansos Program Keluarga Harapan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Berdasarkan Lina

Favourita dkk (2019) Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan adalah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. P2K2 merupakan proses belajar masyarakat untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku. Secara umum P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Sehingga penguatan kemandirian dapat dilakukan pada P2K2, kemandirian KPM Program Keluarga Harapan dapat tinggi apabila keluarga penerima manfaat serius untuk mengikuti P2K2 dengan rutin.

Berdasarkan Herdiawan Gumbira dkk (2022) pemberdayaan menjadi komponen yang penting untuk mendorong keluarga penerima manfaat untuk graduasi pada program keluarga harapan. Berdasarkan Risna Kusumaningrum dkk (2020), Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan adalah terdapat delapan faktor keberhasilan yang membuat KPM mencapai graduasi dari Program Keluarga Harapan, seperti pola pikir, pengalaman pahit di masa lalu, daya juang dan semangat yang tinggi, tidak mudah putus asa, kemampuan pengelolaan uang, memanfaatkan peluang, disiplin dan komitmen serta kepekaan sosial. Pola pikir dan kemampuan atas pengelolaan uang menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan graduasi. Berdasarkan Alanis Sarah Putri dkk (2020) Peningkatan kemandirian dapat dilakukan dengan Peningkatan Kewirausahaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Kemandirian menjadi variabel yang menarik untuk diteliti, berdasarkan Havighurst (dalam DS, 2009) bahwa aspek dari kemandirian terdapat aspek kemampuan ekonomi, sosial, emosi, dan intelektual. Dari aspek tersebut dapat diketahui bagaimana Tingkat kemandirian keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah **“Bagaimana kemandirian keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung?”** Rumusan masalah tersebut dirinci pada sub-sub sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana kemampuan emosi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
4. Bagaimana kemampuan intelektual keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana kemampuan sosial keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik responden penelitian
2. Kemampuan Emosi Keluarga Penerima Manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
3. Kemampuan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
4. Kemampuan Intelektual Keluarga Penerima Manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
5. Kemampuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat program keluarga harapan pasca graduasi di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperluas pemahaman, pengetahuan, dan pengembangan penelitian tentang praktik pekerjaan sosial, terkhusus dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial. Terutama berkaitan dengan pemahaman tentang kemandirian keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan pasca graduasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan jaminan sosial. Hasilnya juga

menambahkan literatur ilmu kesejahteraan sosial ke perpustakaan, sehingga mahasiswa calon pekerjaan sosial dalam mata kuliah jaminan sosial dapat menggunakannya sebagai referensi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan literatur peneliti lainnya, khususnya yang berfokus pada program keluarga harapan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai masukan serta sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemandirian keluarga penerima manfaat program keluarga harapan pasca graduasi bagi peneliti dan pendamping Program Keluarga Harapan dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dengan bertambahnya pengetahuan dan kemampuan berfikir tentang program Kementerian sosial terkhusus Program Keluarga Harapan (PKH) pada praktik di dunia nyata.

b. Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang mana sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kemandirian pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sebelum graduasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi Berdasarkan buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Akhir Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yaitu terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 (satu) terdapat pendahuluan memuat latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Pada Bab 2 (dua) terdapat Kajian Konseptual yang memuat penelitian terdahulu dan teori – teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian yaitu variabel Kemandirian, keluarga penerima manfaat, Program Keluarga Harapan, dan graduasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab 3 (tiga) terkait Metode Penelitian memuat desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah – langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada Bab 4 (empat) terkait Hasil Penelitian Dan Pembahasan memuat gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM

Pada Bab 5 (lima) berisi terkait Usulan Program memuat dasar pemikiran program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilaksanakan, langkah – langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan program.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab 6 (enam) berisi terkait simpulan dan saran yang memuat tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.